

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Pakusari. Kinerja Kecamatan Pakusari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari Tahun 2024.

20 Januari 2025

CAMAT PAKUSARI



SODIQ, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680603 099403 1 008

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAKUSARI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PAKUSARI	6
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN PAKUSARI	8
F. ANGGARAN KECAMATAN PAKUSARI	9
G. ISU STRATEGIS	11
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. PERJANJIAN KINERJA	21
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	24
A. KERANGKA PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023	24
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PAKUSARI.....	25
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	31
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	44
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	44
F. REALISASI ANGGARAN.....	50
BAB IV. PENUTUP.	54

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Kecamatan Pakusari Tahun 2024	6
2. Tabel 1.2.	Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Pakusari Per 31 Desember 2024	8
3. Tabel 1.4	Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun 2024	9
4. Tabel 2.1	Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pakusari Tahun 2021-2026	15
5. Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
6. Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari	21
7. Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
8. Tabel 3.2	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024	25
9. Tabel 3.3	Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	27
10. Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pakusari dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)	29
11. Tabel 3.5	Program Pendukung Sasaran	31
12. Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
13. Tabel 3.7	Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024	46
14. Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun 2024	51

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lampiran SK IKU PD
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Lampiran 4. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026
- Lampiran 5. Cascading

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Baik.
- Sasaran 3* : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Pakusari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan indikator capaiannya **Baik**, Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah indikator capaian dalam kategori **Baik** dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa indikator capaian dalam kategori Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 100,00% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 3.358.184.730,00 dan Belanja Modal sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 66.727.700,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.998.114.092,00 atau 89,28% dari pagu anggaran, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 66. 476.000,00 atau sebesar 99,62%. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Aplikasi SIPD sering mengalami trouble;
2. Koneksi Internet kurang representative;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Menunggu optimalisasi system SIPD;
2. Peningkatan koneksi internet;
3. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Pakusari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Pakusari tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Pakusari
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN PAKUSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Pakusari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Pakusari merupakan unsur merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Pakusari dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Pakusari mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Desa;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/Desa, penetapan penegasan data desa/Desa, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Pakusari terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas

kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas - tugas secara terpadu;
- c. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
- e. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventari dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan;
- h. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- i. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- j. pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

- Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PAKUSARI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Pakusari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Pakusari yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 10 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 14 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang atau 28,57 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Pakusari Tahun 2024

No	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN					Bezetting/ Pegawai Yang Ada					L/P
		Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	1			X		1				X	L
2	Sekretaris	1			X		1			X		L

3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1			X		1		X			P
4	Pengolah Data dan Informasi	1	X				0					-
5	Pengadministrasi Perkantoran	1	X				1	X				L
6	Pengelola Umum Operasional	1	X				0					-
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1			X		1			X		L
8	Penelaah Teknis Kebijakan	1		X			0					-
9	Pengolah Data dan Informasi	1	X				0					-
	Pengadministrasi Perkantoran	1	X				1	X				L
10	Kepala Seksi Pemerintahan	1			X		0					
11	Pengolah Data dan Informasi	1	X				0					-
12	Pengadministrasi Perkantoran	1	X				1	X				P
13	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			X		1			X		L
14	Pengelola Layanan Operasional	1	X				0					-
15	Pengadministrasi Perkantoran	1	X				0					-
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1			X		0			X		P
17	Pengolah Data dan Informasi	2	X				0					
18	Pengadministrasi Perkantoran	1	X				0	X				
19	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1			X		1				X	L
20	Pengolah Data dan Informasi	1	X				0					-
21	Pengadministrasi Perkantoran	2	X				1	X				L
							1	X				P
	JUMLAH	24					12					

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pakusari 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pakusari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Pakusari.

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN PAKUSARI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Pakusari menempati gedung di Jl. Sarangan No. 05 Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Pakusari kurang memadai, karena Peralatan dan sarana prasarana kantor yang kurang Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Pakusari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Pakusari
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gorden	1	Baik	-
2	Genetaring Set	1	Rusak	-
3	Sepeda Motor	1	Baik	-
4	Station Wagon	1	Baik	-
5	Pick Up	1	Baik	-
6	Alat Pemeliharaan Tanaman	2	Baik	-
7	Lemari Besi	6	Baik	12
8	Lemari kayu	6	Rusak : 6 Perbaikan : 0	6
9	Rak kayu	31	Rusak	-
10	Brankas	2	Rusak	-
11	Papan Visual	4	Rusak	4

12	Mebeuler	238	Baik	-
13	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	-
14	Alat Pendingin (AC)	22	Baik	-
15	Kipas angin	4	Rusak	4
16	Televisi	2	Baik	-
17	Loudspeaker	1	Baik	2
18	Camera Video	2	Baik	-
19	Alat Pemadam	2	Baik	-
20	Komputer	7	Baik	14
21	Printer	6	Baik	14
22	Gedung dan Bangunan	4	Baik	5
	Jumlah	345	Baik	55

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Pakusari Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN PAKUSARI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Pakusari memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.424.912.430,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Pakusari
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2.306.393.730,-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 657.500,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 657.500,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 1.834.862.430,-
	Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.834.862.430,-
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 139 303 700,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	139 303 700,-
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	169.190.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	69.190.000,-
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	162.380.100,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	63.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	45.617.600,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	53.762.500,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	487.440.000,-
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	479.260.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	479.260.000,-
2.2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp.	8180.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp.	8180.000,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa	Rp.	206.787.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	206.787.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	9.362.900,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	197.424.100,-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	424.291.700,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	424.291.700,-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	424.291.700,-
	JUMLAH	Rp.	3.424.912.430,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Pakusari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- 2) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- 3) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- 4) Ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah;
- 5) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- 6) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- 7) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Pakusari adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Pakusari memiliki luas

wilayah 29,11 km² dan terletak pada ketinggian ±142 km dari permukaan air, Kecamatan Pakusari berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Arjasa
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakusari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pakusari
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumpalsari

Secara administrasi Kecamatan Pakusari terbagi menjadi 7 (tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Kertosari
2. Desa Pakusari
3. Desa Jatian
4. Desa Subo
5. Desa Sumber
6. Desa Bedadung
7. Desa Patemon

Ditinjau dengan indikator curah hujan di Kecamatan Pakusari adalah :

- Curah hujan terbesar : 354 mmHg
- Curah hujan terendah : 41 mmHg

Ditinjau dari produktifitas hasil pertanian Kecamatan pakusari adalah sebagai berikut :

No.	Desa	Luas Tanah (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (ton/Ha)
1	Kertosari	638	638	6
2	Pakusari	696	696	6
3	Jatian	437	437	5,5
4	Subo	296	296	5,5
5	Sumber Pinang	706	706	5,5
6	Bedadung	416	416	5,8
7	Patemon	332	332	5,8
		3521	3521	5,5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Pakusari merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Pakusari Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Pakusari yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Pakusari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pakusari
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	91%	92%	93%	94%	95%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82,5	88,5	88,75	89	89,5
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------	------

Sumber : TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		<p>Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<p>Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

		masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi</p> <p>Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari no 065 /065/35.09.24/ 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %

4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	93
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	93 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.306.393.730,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 487.440.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa	Rp. 206.787.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 424.291.700,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.424.912.430,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pakusari terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik pemerintahan yang baik

Didukung oleh :

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp. 2.306.393.730,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp, 2.306.393.730,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 67,34% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Pakusari .

- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 487.440.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 487.440.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 14,23 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Pakusari .

- c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa dengan Anggaran Rp. 206.787.000,00
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 424.291.700,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 631.078.700,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 18,43% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Pakusari .

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Pakusari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Pakusari .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA Kecamatan Pakusari

Kecamatan Pakusari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pakusari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7 *100%)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Pemerintah Daerah					
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	89.5	100,85%	89.5	100%
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	93	80,44	86,50	95	91,05
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	93 %	89,48%	96,22%	95%	94,20%

Sumber Data Realisasi : TC.25 Renstra Kecamatan Pakusari.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 6 (enam) indikator sasaran Kecamatan Pakusari rata rata mencapai 93,24% dan masuk dalam kategori

sangat memuaskan Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 97% Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Pakusari . telah melaksanakan tugas pokok fungsi secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakusari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen`	4 Dokume n
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82,5	88	89.5
3. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100 %	100 %	100 %
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		100 %	100 %	100 %
5. Meningkatkan kualitas	Nilai SAKIP OPD	-	69	74,50	80,44

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.					
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	96,22%	89,52%	89,48%

Sumber Data Realisasi: Kecamatan Pakusari 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang stabil sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang fluktuatif sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pakusari dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Th.2024 Nasional/ Prov. Jatim/ Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		-	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.5	87,33 (IKM Kab. Jember)	
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%		
4	Terjaganya	Persentase	100%		

.	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	80,44	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%		

Sumber Data: Sumber Data: Data Realisasi Kinerja Kec Pakusari; SUKMA-e Kecamatan Pakusari; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Th.2024, LHE AKIP Kab. Jember th. 2024

Dari enam indikator Kecamatan Pakusari, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama . Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Pakusari tahun 2024 lebih tinggi sebesar 2,17 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Pakusari cukup optimal dan mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Pakusari tahun 2024 lebih tinggi 17,94 Poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggara n
Sasaran 1 : Meningkatn ya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.306.393.730	Rp 1.991.924.492	86,37 %
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 657.500	Rp 657.500	100 %
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 657.500	Rp 657.500	100 %
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.834.862.430	Rp 1.599.017.701	87,15 %
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.834.862.430	Rp 1.599.017.701	87,15 %
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 139.303.700	Rp 118.141.991	84,81 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 139.303.700	Rp 118.141.991	84,81 %
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang	Rp 169.190.000	Rp 163.190.000	96,45 %

	Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 169.190.000	Rp 163.190.000	96,45 %
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 162.380.100	Rp 110.917.300	68,31 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 63.000.000	Rp 61.903.800	98,26 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 45.617.600	Rp 45.533.500	99,82 %
	Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 53.762.500	Rp 3.480.000	6,47 %
Total		Rp 2.306.393.730	Rp1.991.924.492	86,37%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 487.440.000	Rp 482.902.200	99,07 %
	Kegiatan : Koordinasi	Rp 479.260.000	Rp 474.802.200	99,07 %

Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 479.260.000	Rp 474.802.200	99,07 %
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 8.180.000	Rp 8.100.000	99,02 %
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 8.180.000	Rp 8.100.000	99,02 %
Total		Rp 487.440.000	Rp 482.902.200	99,07 %
Sasaran 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa	Rp 206.787.000	Rp 197.870.300	95,69 %
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 206.787.000	Rp 197.870.300	95,69 %
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 9.362.900	Rp 8.831.000	94,32 %

	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 197.424.100	Rp 189.039.300	95,75 %
Total		Rp 206.787.000	Rp 197.870.300	95,69 %
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
Total		Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** (Meningkatn ya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 657.500	Rp 657.500
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Tujuan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 1.834.862.430	Rp 1.599.017.701
Output	Jumlah orang	Orang	12	12

Persentase serapan anggaran 87,15 % dikarenakan kurangnya personil ASN dikarenakan ada yang pensiun dan Meninggal dunia selaku output Anggaran.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 139.303.700	Rp 118.141.991
Output	Jumlah paket	Paket	2	2

Pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan tugas administrasi kantor. Dengan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 169.190.000	Rp 163.190.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	69	69

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 63.000.000	Rp 61.903.800
Output	Jumlah Kendaraan	Unit	1	1

Kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat yaitu Camat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 45.617.600	Rp 45.533.500
Output	Jumlah Kendaraan	Unit	2	2

Tujuan kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional adalah untuk memastikan kendaraan dinas dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terjaga kualitasnya. Pada Kecamatan Pakusari terdapat 1 (satu) kendaraan operasional Satpol PP. Selain pemeliharaan termasuk didalamnya adalah pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional.



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 53.762.500	Rp 3.480.000
Output	Jumlah Gedung	Unit	3	-

Tujuan kegiatan pemeliharaan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk memastikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terjaga kualitasnya. Pada Kecamatan Pakusari terdapat 3 (tiga) Gedung yang akan

di Rehab, yaitu Gedung PKK, Gedung Kantor dan Pagar Belakang Kantor Kecamatan, namun berdasarkan temuan dan saran Saran Inspektorat tidak boleh dilaksanakan karena masuk belanja Modal..

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan) adalah sebagai berikut :

2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 479.260.000	Rp 474.802.200
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	14	14

Tujuan sub kegiatan ini adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pembinaan RT/RW yang diselenggarakan di tiap Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.



Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 8.180.000	Rp 8.100.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	4	4

Tujuan sub kegiatan ini adalah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pembinaan Petugas aparatur desa yang mengurus adminduk, menyelenggarakan urusan pelayanan umum.



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3** (Meningkatn ya Fasilitas Kesejahtera an Masyarakat di Kecamatan) adalah sebagai berikut :

3. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 9.362.900	Rp 8.831.000
Output	Jumlah Lembaga	Lembaga	8	8
		Kemasyaraka		

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di drsa bertujuan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menumbuhkan kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena Pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal tanpa keterlibatan Masyarakat.



Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 197.424.100	Rp 189.039.300
Output	Jumlah Laporan	Laporan	18	18

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan desa di wilayah kecamatan Pakusari. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai koordinator yang melakukan sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, pencegahan Stunting dan Bumil KEK serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa diantaranya dengan melaksanakan Pembinaan Pengurus Karang Taruna, Pembinaan Puskesmas, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pik-R /Fad, Sosialisasi Pencegahan Pms/lms Dalam Rangka Penurunan AKI/AKB.



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 4** (Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan) adalah sebagai berikut :

4. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800
Output	Jumlah Laporan	Laporan	16	16

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Linmas Se-wilayah Kecamatan Pakusari Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Pakusari melaksanakan Bimtek Netralitas ASN menjelang Pilpres 2024, melibatkan seluruh Pegawai ASN diwilayah kecamatan Pakusari juga rakor persiapan penertiban APK Pilkada area-area umum yang dilarang. Hal ini diharapkan kegiatan pilpres juga Pilkada berjalan lancar dan kondusif.



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Pakusari berjumlah ... orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.424.912.430,- , melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	88,83%	86,37%	Efisien/ Tidak Efisien
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	100%	99,07 %	Efisien/ Tidak Efisien
3. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	100%	95,69 %	Efisien/ Tidak Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%	92,42 %	Efisien/ Tidak Efisien
5. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100%	99,07 %	Efisien/ Tidak Efisien
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	100%	87,15 %	Efisien/ Tidak Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

- Capaian kinerja Sasaran 1: 88,83% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 2: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 4: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.
- Capaian kinerja Sasaran 5: 99,07% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran
- Capaian kinerja Sasaran 6: 87,15% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Pakusari menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
Indikator 1.1	88,83%		√			
Rata rata capaian	88,83%		√			
Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 3 Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban						

umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 5 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator 1.1	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator 1.1	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran strategi mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 88,83%. beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- **Faktor** yang mendukung keberhasilan meliputi kerja sama yang solid, koordinasi yang efektif, serta penerapan tata kelola yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- **Solusi** untuk mengatasi hambatan di masa depan meliputi penetapan target yang realistis, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan, serta membangun sistem komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas.
- Perencanaan ke depan mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan pemantauan terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Inovasi atau program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan melibatkan penguatan proses kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan, dengan menyatukan berbagai sudut pandang sehingga tercipta visi yang mendukung pencapaian tujuan bersama

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Strategis mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- **Faktor** pendorong keberhasilan mencakup kesadaran tinggi untuk melayani masyarakat, antusiasme pegawai dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan rapat evaluasi rutin untuk meninjau kualitas layanan, keterampilan pegawai dalam melayani, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan standar pelayanan yang optimal.
- **Solusi** untuk menghadapi kendala di masa mendatang adalah mempercepat proses penyelesaian layanan, menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, serta mengembangkan kompetensi petugas layanan.

- **Rencana** perbaikan ke depan melibatkan identifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.
- **Inovasi** atau program kolaborasi dengan pemangku kepentingan dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas untuk saling berbagi informasi dan menyesuaikan layanan atau kegiatan guna mencapai tujuan bersama.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Strategis mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- **Faktor** pendorong keberhasilan meliputi koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan fasilitasi serta pemberian pelayanan yang berkualitas.
- **Solusi** untuk mengatasi kendala di masa depan meliputi peningkatan akses terhadap kegiatan fasilitasi, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas fasilitasi.
- **Rencana** perbaikan ke depan mencakup pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia, penguatan kelembagaan kelompok, dan penyediaan informasi yang relevan dan bermanfaat.
- **Inovasi** atau program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan melibatkan pendekatan partisipatif, penggunaan teknologi, serta pelaksanaan pelatihan keterampilan.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Strategis mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- **Faktor** pendorong keberhasilan mencakup tanggung jawab bersama dalam setiap usaha menjaga ketertiban dan ketenteraman di tengah masyarakat.
- **Solusi** untuk mengatasi kendala di masa mendatang adalah menerapkan penegakan hukum secara tegas guna menjaga ketertiban dan ketenteraman, disertai pengawasan rutin serta penyuluhan kepada masyarakat.
- **Rencana** perbaikan ke depan meliputi peningkatan kapasitas aparat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di lingkungan sekitar, serta meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan siskamling.
- **Inovasi** atau program kolaborasi dengan pemangku kepentingan melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam menjaga ketertiban, serta penerapan sistem pengawasan dan pemantauan yang terstruktur dengan baik.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.424.912.43 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.358.184.730,00 terealisasi sebesar Rp. 2.998.114.092,- (89,28%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 66.727.700,00 terealisasi sebesar Rp. 66.476.000,- (99,62%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.306.393.730	Rp 1.991.924.492	86,37 %
1.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 657.500	Rp 657.500	100 %
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 657.500	Rp 657.500	100 %
1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.834.862.430	Rp1.599.017.701	87,15 %
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.834.862.430	Rp 1.599.017.701	87,15 %
1.3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 139.303.700	Rp 118.141.991	84,81 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 139.303.700	Rp 118.141.991	84,81 %
1.4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 169.190.000	Rp 163.190.000	96,45 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 169.190.000	Rp 163.190.000	96,45 %
1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 162.380.100	Rp 110.917.300	68,31 %
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp 63.000.000	Rp 61.903.800	98,26 %

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 45.617.600	Rp 45.533.500	99,82 %
	Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 53.762.500	Rp 3.480.000	6,47 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 487.440.000	Rp 482.902.200	99,07 %
2.1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 479.260.000	Rp 474.802.200	99,07 %
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 479.260.000	Rp 474.802.200	99,07 %
2.2	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 8.180.000	Rp 8.100.000	99,02 %
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 8.180.000	Rp 8.100.000	99,02 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 206.787.000	Rp 197.870.300	95,69 %

	Dan Desa			
3.1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 206.787.000	Rp 197.870.300	95,69 %
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 9.362.900	Rp 8.831.000	94,32 %
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 130.696.400	Rp 189.039.300	95,75 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
4.1	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 424.291.700	Rp 392.144.800	92,42 %
	JUMLAH	Rp3.424.912.430,-	Rp3.064.590.092,-	89,48 %

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Pakusari sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Pakusari disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pakusari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 4 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 1 indikator tidak sedikit melebihi target dengan kategori tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan kompetensi pegawai dan fasilitas pendukung.

Pengembangan terencana pada pegawai dan penyediaan sarana prasarana yang relevan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Lingkungan kerja yang mendukung efektivitas layanan.

Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif mempermudah pelaksanaan layanan yang cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat

3. Keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Pengelolaan keuangan dan aset yang teratur, efisien, transparan, dan akuntabel mendukung keberlangsungan program dan kegiatan secara optimal

4. **Keterlibatan dan tanggung jawab Bersama.**

Pelaksanaan setiap kegiatan didasarkan pada prinsip gotong-royong dan tanggung jawab kolektif, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan optimal.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. **Penetapan target kinerja yang spesifik dan terukur.**

Menentukan sasaran kinerja yang jelas, realistis, dan dapat diukur dengan indikator yang relevan, sehingga memungkinkan pemantauan dan evaluasi pencapaian secara akurat untuk mendukung perencanaan yang lebih baik.

2. **Mendorong perubahan budaya kerja menuju positif.**

Mengelola perubahan organisasi secara strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan profesionalisme, sehingga mampu membentuk budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

3. **Penguatan kelembagaan dan sistem tata Kelola**

Memperkokoh struktur kelembagaan melalui perbaikan tata kelola, penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, serta penerapan sistem manajemen yang modern, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur.

4. **Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.**

Membangun sistem pengawasan yang transparan dan berintegritas, serta memastikan pertanggungjawaban kinerja berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI
JL. SARANGAN No. 05 SUMBERPINANG PAKSUARI JEMBER 68181

KEPUTUSAN CAMAT PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 /065/35.09.24/ 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari Kecamatan Pakusari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 28 Februari 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN PAKUSARI

Jl. Sarangan Nomor 05 Telp. (0331)7717655 PAKUSARI Jember 68181

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SODIQ, S.Pd, M.Si

Jabatan : Camat Pakusari Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.




Jember, 26 Januari 2024
Pihak Pertama
CAMAT PAKUSARI,
SODIQ, S.Pd, M.Si
NIP. 19680603 199403 1 008


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN PAKUSARI

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnyapenataanorganisasipemerintah daerahdantatalaksanapenyelenggaraanpemerintahandanpelayanan publik.	JumlahDokumenPenataanOrganisasi dan Tata LaksanaPemerintah Daerah	4 Dokume
2.	MeningkatnyaKepuasanMasyarakatdalamhal PelayananPublik yang MeratadanBerkualitas di Kecamatan	IndeksKepuasanMasyarakat	88,75
3.	Meningkatnya FasilitasKesejahteraanMasyarakatKecamatan	PersentaseFasilitasKesejahteraanma syarakat yang dilaksanakan	100
4.	Terjaganyaketertibanumumdanketentraman masyarakatdi Kecamatan	Persentase Tingkat PenyelesaianLaporandanPelanggaran KetertibanUmumsertaKetentraman Masyarakat	100
5.	Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangand anasetdaerah yang profesional, efektif, danefisien.	Nilai SAKIP OPD	93
6.	MeningkatnyaEfektifitasPencapaian Target KinerjaPerangkat Daerah	PersentaseIndikator Program yang tercapai	93

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.306.393.730,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 487.440.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 206.787.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 424.291.700,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.424.912.430,00	

Pinak Kedua

BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

Kepala PD,
SODIQ, S.Pd,M.Si
NIP. 19680603 199403 1 008

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 27 Renstra Kecamatan Pakusari

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.				Nilai SAKIP OPD	-	C	B (67)	3.122.768.946	B (68)	2.782.845.125	B (69)	2.971.057.200	B (70)	3.072.133.630	BB (75)	3.219.585.807	BB (75)	15.168.390.708		
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program yang tercapai	%	100	100	3.122.768.946	100	2.782.845.125	100	2.971.057.200	100	3.072.133.630	100	3.219.585.807	100	15.168.390.708		
		7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	3.122.768.946	100	2.782.845.125	100	2.971.057.200	100	3.072.133.630	100	3.219.585.807	100	15.168.390.708		
		7 1 1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	--	--	--	0	9 Dok	8.500.000	9 Dok	8.925.000	9 Dok	9.371.250	27 Dok	26.796.250			
		7 1 1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	--	--	--	0	9 Dok	8.500.000	9 Dok	8.925.000	9 Dok	9.371.250	27 Dok	26.796.250	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan	
		7 1 1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	--	--	26 Laporan	2.301.912.000	26 Laporan	2.410.843.600	26 Laporan	2.531.385.780	26 Laporan	2.657.955.069	104 Laporan	9.902.096.449		
		7 1 1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	--	--	20/OB	2.178.632.000	22/OB	2.287.563.600	24/OB	2.401.941.780	26/OB	2.522.038.869	26/OB	9.390.176.249	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dok.	--	--	12 Dok.	123.280.000	0	0	0	0	0	0	12 Dok.	123.280.000	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	--	--	0	0	12 Dok.	123.280.000	12 Dok.	129.444.000	12 Dok.	135.916.200	36 Dok.	388.640.200	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	--	--	1 Dok	29.700.000	1 Dok	31.185.000	1 Dok	32.744.250	1 Dok	37.655.888	4 Dok	131.285.138		
		7 1 1	02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	--	--	30 Paket	29.700.000	30 Paket	31.185.000	30 Paket	32.744.250	30 Paket	37.655.888	120 Paket	131.285.138	Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	--	--	20 Laporan	219.940.800	20 Laporan	297.440.800	20 Laporan	266.690.800	20 Laporan	267.440.800	80 Laporan	1.051.513.200		
		7 1 1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	--	--	1 Paket	20.952.000	1 Paket	20.952.000	1 Paket	20.952.000	1 Paket	20.952.000	4 Paket	83.808.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	--	--	1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	1 Paket	173.629.800	4 Paket	694.519.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	--	--	1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	1 Paket	9.156.000	4 Paket	36.624.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7 1 1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	--	--	1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	1 Paket	16.203.000	4 Paket	64.812.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		7	1	1	02.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap.	--	--	--	0	4 Laporan	32.500.000	4 Laporan	32.500.000	4 Laporan	32.500.000	12 Laporan	97.500.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan	
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Lap.	--	--	--	0	30 Laporan	45.000.000	35 Laporan	14.250.000	40 Laporan	15.000.000	105 Laporan	74.250.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan	
		7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	--	--	--	0	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	31.500.000	3 Laporan	33.075.000	9 Laporan	94.575.000			
		7	1	1	02.07	5	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Paket	--	--	0	0	3 Paket	30.000.000	4 Paket	31.500.000	4 Paket	33.075.000	11 Paket	94.575.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan	
		7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	--	--	0	0	4 Unit	150.000.000	4 Unit	157.500.000	4 Unit	165.375.000	12 Unit	472.875.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan	
		7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	--	--	--	28 Laporan	113.204.525	28 Laporan	75.000.000	28 Laporan	82.800.000	28 Laporan	96.000.000	112 Laporan	367.004.525		
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Lap.	--	--	--	12 Laporan	49.198.925	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.500.000	48 Laporan	234.698.925	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lap.	--	--	--	4 Laporan	10.761.600	4 Laporan	13.500.000	4 Laporan	15.800.000	4 Laporan	17.500.000	16 Laporan	57.561.600	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Lap.	--	--	--	12 Laporan	53.244.000	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	8.000.000	48 Laporan	74.744.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	--	--	--	4 Laporan	118.087.800	4 Laporan	118.087.800	4 Laporan	118.087.800	4 Laporan	118.087.800	16 Laporan	472.351.200		
		7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	--	--	--	1 Unit	26.561.400	1 Unit	26.561.400	1 Unit	26.561.400	1 Unit	26.561.400	4 Unit	106.245.600	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	--	--	--	3 Unit	29.646.400	3 Unit	29.646.400	3 Unit	29.646.400	3 Unit	29.646.400	12 Unit	118.585.600	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	--	--	--	3 Unit	46.750.000	3 Unit	46.750.000	3 Unit	46.750.000	3 Unit	46.750.000	12 Unit	187.000.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan
		7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	--	--	--	2 Unit	15.130.000	2 Unit	15.130.000	2 Unit	15.130.000	2 Unit	15.130.000	8 Unit	60.520.000	Sub Bag. Umum & Kepegawaian	Kantor Kecamatan

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.							Dokumen 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Dokumen	4 Dok	4 Dok	3.259.000.000	4 Dok	3.259.000.000	4 Dok	3.259.000.000	4 Dok	3.259.000.000	4 Dok	3.159.000.000	16 Dok	14.049.000.000		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								Indeks Kepuasan Masyarakat		90,24	93	1.113.000.000	93	1.113.000.000	93	1.113.000.000	94	1.113.000.000	94	1.013.000.000	94	5.465.000.000		
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	90,24	85	1.113.000.000	93	1.113.000.000	95	1.113.000.000	97	1.113.000.000	98	1.013.000.000	98	5.465.000.000		
		7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	--	--	--	100	667.678.400	100	667.678.400	100	667.678.400	100	567.678.400	100	2.570.713.600		

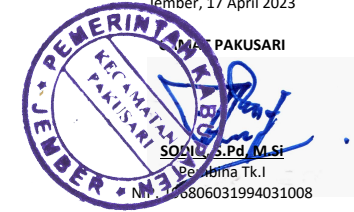
Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
		Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok.	--	--	--	15 Dok	667.678.400	15 Dok	667.678.400	15 Dok	667.678.400	15 Dok	667.678.400	60 Dok	2.670.713.600	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan
		7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	--	--	--	100	445.321.600	100	445.321.600	100	445.321.600	100	445.321.600	100	1.781.286.400		
		7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	--	10.000 Laporan	445.321.600	10.000 Laporan	445.321.600	10.000 Laporan	445.321.600	10.000 Laporan	445.321.600	40.000 Laporan	1.781.286.400	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	%	80	80	1.130.000.000	80	1.130.000.000	85	1.130.000.000	90	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	4.520.000.000		
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	80	80	1.130.000.000	80	1.130.000.000	85	1.130.000.000	90	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	4.520.000.000		
		7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	--	--	--	80	1.130.000.000	85	1.130.000.000	90	1.130.000.000	95	1.130.000.000	95	4.520.000.000		
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb./Desa	--	--	--	5 Lemb./Desa	265.000.000	5 Lemb./Desa	265.000.000	5 Lemb./Desa	265.000.000	5 Lemb./Desa	265.000.000	5 Lemb./Desa	1.060.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	--	9 Laporan	865.000.000	9 Laporan	865.000.000	9 Laporan	865.000.000	9 Laporan	865.000.000	36 Laporan	3.460.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Kantor Kecamatan
	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan							Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	4.064.000.000		
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	4.064.000.000		
		7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	--	--	--	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	52 Laporan	3.255.540.000		
		7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap.	--	--	--	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	13 Laporan	813.885.000	52 Laporan	3.255.540.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan
		7	1	4	07.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	--	--	--	100	202.115.000	100	202.115.000	100	202.115.000	100	202.115.000	100	808.460.000		
		7	1	4	07.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap.	--	--	--	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	2 Laporan	202.115.000	8 Laporan	808.460.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

Jember, 17 April 2023

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661107 198809 1 001



SODIQ, S.Pd, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 196806031994031008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI**

Jalan Sarangan Nomor 05 Telp. (0331) 7717655 PAKUSARI 68181

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif, Dan Efisien	NILAI SAKIP
			Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

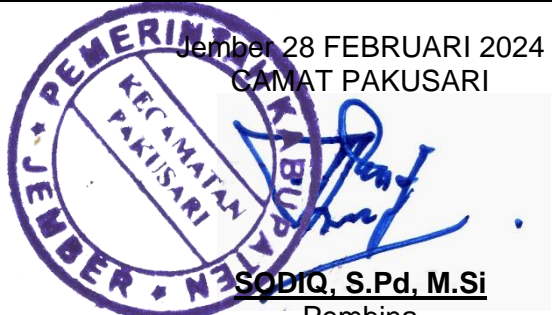
RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	93 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOT	Persentase realisasi anggaran	100%				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan penyusunan dokumen perubahan RKA	6 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan penyusunan dokumen perubahan RKA	6 dokumen	657.500
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.834.862.430
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket		jumlah paket peralatan an perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	139.303.700
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69 Laporan	169.190.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 unit	63.000.000

					Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	45.617.600
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	53.762.500
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	100 %				
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	14 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	14 Dokumen	479.260.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Jumlah dokumen koordinasi sinergi dengan	4 dokumen	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Jumlah dokumen koordinasi sinergi dengan perangkat	4 dokumen	8.180.000

					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	perangkat daerah dan atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	daerah dan atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100 %				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	9.362.900
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	197.424.100
		Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban	100 %	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di	100 %				

			Umum serta Ketentaraman Masyarakat			tingkat Kecamatan					
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	424.291.700

Jember 28 FEBRUARI 2024
 CAMAT PAKUSARI

SODIQ, S.Pd, M.Si
 Pembina
 NIP. 19680603 199403 1 008

MISI 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya

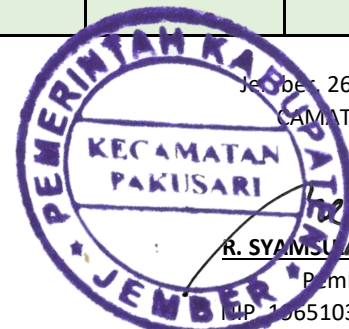
R P J M D				RENSTRA KECAMATAN							
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan RENSTRA KECAMATAN	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA KECAMATAN	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						SEKRETARIAT OPD					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelemgbagaan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor
										2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
										3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi
										4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-

						5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik
								2. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik
								3. Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan (Kecamatan))	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1) Prosentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik
								2) Prosentase terfasilitasinya kegiatan Pembinaan Perangkat Desa
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Pakusari dengan baik

							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum dengan Baik
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
								2) Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Pakusari
								3) Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaknanya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik

							4) Prosentase Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan AKI, AKB, AKBAL, dan Stanting di wilayah Kecamatan Pakusari dengan Baik
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Pakusari
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Pakusari

Jember, 26 Agustus 2021
CAMAT PAKUSARI



R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos

Pembina Tk.I

NP 10651031 199602 1 002